

PERAN PKN DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEWARGANEGARAAN MELALUI PENDEKATAN BERBASIS NILAI DI PERGURUAN TINGGI

Purnomo Cahyo Aji

Prodi PPKn FKIP UNS, Surakarta

purnomocahyoaji@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan PKN dalam upaya pembentukan karakter kewarganegaraan mahasiswa melalui proses pendekatan berbasis nilai pada pembelajaran mata kuliah PKN dalam perguruan tinggi sehingga mewujudkan *good citizen*. PKN di perguruan tinggi adalah bagaimana mendidik para mahasiswa sebagai calon intelektual bangsa menjadi warga negara yang baik yang dapat memahami tentang substansi nilai-nilai falsafah negaranya, memiliki kepribadian yang mantap, berpandangan luas dan mampu bersikap demokratis yang berkeadaban. Kompetensi dasar dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa nantinya dapat menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) dan cinta tanah air (patriotisme), menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin serta dapat berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif studi pustaka, dengan menggunakan sumber data literatur jurnal, buku-buku dan penelitian ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini yakni PKN sebagai media pendidikan karakter bukan sekedar mengenalkan nilai-nilai kepada mahasiswa, tetapi juga harus mampu menginternalisasi nilai-nilai berdasarkan pancasila agar berfungsi sebagai muatan hati nurani sehingga mampu membangkitkan penghayatan dan pengamalannya sebagai warga negara, nilai-nilai inilah yang akan menyusun ketahanan mental dan moral manakala terjadi pertemuan antar nilai yang berbenturan.

Kata Kunci: *Karakter Kewarganegaraan, Nilai, PKN.*

PENDAHULUAN

PKN sebagai program pendidikan kurikuler pada hakekatnya bertujuan membentuk warga negara yang baik, ukuran warga negara yang baik tentu saja adalah sesuai dengan pandangan hidup dan nilai hidup yang diyakini bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian PKN selalu terikat dengan nilai. PKN merupakan *value based education* (Budimansyah & Suryadi, 2008). Nilai itulah yang dijadikan arah pengembangan warga negara yang dimaksud. PKN dalam kurikulum perguruan tinggi juga tidak lepas dari nilai-nilai bangsa yang dijadikan arah pengembangan PKN sebagai mata kuliah. Kompetensi dasar mata kuliah PKN di PT adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi

aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.¹ Berdasarkan hal di atas jelas bahwa PKn di Indonesia berlandaskan nilai-nilai dasar yang diyakini bangsa Indonesia dalam hal ini adalah Pancasila yang turunannya ada dalam UUD 1945. Dengan demikian PKn tidak menganut pendekatan bebas nilai. Pendidikan yang bebas nilai cenderung individualis dan liberalis. Karena itu pengembangan PKn nantinya akan selalu dan diharapkan mendasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Muatan materi dalam PKn diharapkan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

Permasalahan rendahnya tingkat kualitas lulusan bisa disebabkan oleh ketidak sinkronan/kesenjangan program Perguruan Tinggi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Kesenjangan tersebut dikarenakan oleh sistem pembelajaran yang diterapkan di Perguruan Tinggi saat ini masih berorientasi pada hard skill yakni menyiapkan mahasiswa yang cerdas keilmuan, cepat lulus dan segera mendapat pekerjaan. Sementara itu pembelajaran yang berorientasi nilai pada kreativitas, inovatif, mandiri, jujur, disiplin, kerja keras, toleransi dan saling menghargai (pembelajaran berorientasi karakter) belum maksimal diterapkan.

Urgensi penelitian ini untuk menjabarkan substansi pembelajaran PKn yang berdampak pada pembentukan karakter kewarganegaraan dalam diri mahasiswa sesuai Standar Isi PKn 2006 yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter kewarganegaraan (*civic knowledge, civic skill, dan civic disposition*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan penulisan penelitian ini untuk dapat menjelaskan karakter warga negara menurut pandangan Pancasila, mengidentifikasi karakter kewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjelaskan makna dari warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, dan menjelaskan pendekatan berbasis nilai mampu menginternalisasi karakter kewarganegaraan dalam diri mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian ini tidak dilaksanakan secara otentik pada suatu tempat maupun waktu tertentu, karena dalam penelitian ini tidak merupakan hasil dari penelitian di suatu Perguruan Tinggi, namun berupa suatu kajian kritis berdasarkan studi pustaka dan

¹ SK Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006

dianalisis atas fenomena eksistensi PKn yang umumnya mampu membentuk karakter kewarganegaraan melalui pendekatan berbasis nilai untuk diterapkan terhadap mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best,1982:119). Penelitian ini juga sering disebut non-eksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (West, 1982).

Penggalan data menggunakan studi pustaka untuk memperoleh informasi melalui literatur jurnal, buku-buku dan penelitian ilmiah yang relevan untuk selanjutnya dianalisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakter Kewarganegaraan menurut Pancasila

Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya dan secara khusus pada pendidikan kewarganegaraan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional memiliki beberapa makna. Secara filosofis pendidikan nasional merupakan keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara substansif-edukatif pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Secara sosio politik hasil pendidikan untuk menghasilkan anggota masyarakat, komponen bangsa dan warga negara yang cerdas dan baik sesuai Pancasila dan UUD 1945. Secara *praxis-pedagogis* dan *andragogis* nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 diwujudkan proses belajar dan pembelajaran.²

Pada konteks membangun visi kenegaraan dan kebangsaan indonesia yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, Pancasila umumnya dinyatakan sebagai tujuan akhir terwujudnya konsepsi kewarganegaraan indonesia yang ideal. Dinyatakan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi

² Winarno dan Wijianto, *Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn)*, (Surakarta : Laboratorium PPKn UNS & UNS Press, 2010). Hlm. 76.

warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.³ Pemetaan yang dilakukan Kalidjernih (2007) juga menunjukkan bahwa fokus PKn di Indonesia pada tahun 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994 adalah pembentukan manusia Pancasila.⁴

Secara kontekstual sistem PKn di Indonesia di pengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif (*intracaptive knowledge*) berupa agama dan Pancasila (Soemantri, 2001). Berdasar hal ini dapat dinyatakan bahwa Pancasila menempatkan diri sebagai landasan, isi dan tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Berkaitan dengan tujuan dan cita-cita ini, dinyatakan bahwa arah PKn di Indonesia adalah menuju terwujudnya atribut masyarakat madani yang bercirikan berketuhanan yang maha esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokratis-konstitusional, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berbhinneka tunggal ika, menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban manusia dan mencintai perdamaian dunia (Winataputra, 2006).⁵ Ciri demikian tidak lain adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang sekaligus pula menunjukkan karakter ideal bangsa dan warga negara yang berdasar Pancasila.

2. Karakter kewarganegaraan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan

Karakter ideal warga negara sebagaimana digambarkan dalam perundangan suatu negara akan senantiasa berubah mengikuti peraturan yang bersangkutan. Bahkan karakter warga negara suatu negara berbeda dengan karakter warga negara negara lain, ini sesuai pendapat Aristoteles bahwa karakteristik warga suatu negara akan ditentukan oleh konstitusi negara yang bersangkutan (Derek Heater, 2004).⁶

Konsep warganegara bervariasi dari suatu konstitusi ke konstitusi, dan perbedaan konstitusi menentukan perbedaan tipe-tipe warganegara. Penegasan ini berdampak besar bagi praktek penyelenggaraan bernegara khususnya apa yang menjadi kriteria warganegara

³ Permendiknas Nomor 22 tahun 2006.

⁴ Winarno dan Wijianto, *Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn)*, (Surakarta : Laboratorium PPKn UNS & UNS Press, 2010). Hlm. 78.

⁵ Ibid

⁶ Winarno dan Wijianto, *Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn)*, (Surakarta : Laboratorium PPKn UNS & UNS Press, 2010). Hlm. 79-81.

yang baik. Dengan demikian kriteria warganegara bisa dilihat dari bagaimana rumusan konstitusi negara menyatakannya. Tidak cukup melalui konstitusi, dapat juga penentuan warga negara dilakukan melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.⁷

Bagaimana gambaran karakter warganegara indonesia menurut konstitusi negara?

- a. Tahun 1945, kementerian PPK menyatakan; “... untuk mendidik warganegara sejati bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat dengan ciri-ciri: perasaan bakti kepada Tuhan YME, perasaan cinta kepada negara, perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan, perasaan berhak memajukan negaranya, keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada peraturan tata tertib keyakinan bahwa manusia itu sama derajatnya sehingga harus saling menghormati, negara memerlukan warganegara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan.
- b. UU No 4 tahun 1950 dalam bab II pasal 3 (Djojonegoro, 1996) dirumuskan secara lebih eksplisit menjadi “... membentuk manusia susial yang cakap dan warganegara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat di tanah air.
- c. Dalam UU No 12 tahun 1954 dilengkapi Keppres RI No 145 tahun 1965 di ubah menjadi: “... melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis indonesia, adil dan makmur baik spirituiil maupun materildan yang berjiwa pancasila”
- d. UU No 2 tahun 1989 tentang sisdiknas dirumuskan bahwa tujuan pendidikan tujuan nasional adalah: “...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya ...” yang ciri-cirinya dirinci menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan...” (Pasal 4,UU no 2 / 1989)
- e. UU No 20 tahun 2003, disebutkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

⁷ Ibid.

tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3. Pendekatan Berbasis Nilai dalam PKn

Menurut Kaelan (200) Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu pendidikan nilai dalam hal ini adalah nilai moral. Dalam klasifikasi filsafat nilai dibedakan atas nilai logika, nilai estetika, dan nilai etika (moral), melalui pendekatan filsafati dikatakan bahwa pancasila adalah suatu sistem etika, sebuah sistem nilai.⁸

PKn sebagai pendidikan nilai harus mengikutsertakan pula pendekatan pendidikan yang dipakai dalam kerangka proses penyampaian nilai pada anak. Pendekatan berbasis nilai dinamakan sebagai strategi atau cara bagaimana nilai dibelajarkan pada subyek didik.

Sehubungan dengan pendekatan nilai, banyak para pakar telah mengembangkan berbagai pendekatan dalam pendidikan nilai, dikenal 5 model pendekatan yaitu:

a. Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach)

Adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Menurut Superka et al. (1976), tujuan pendekatan ini adalah pertama, diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa. Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan, peranan, dll. Oleh karena itu, yang perlu diajarkan kepada generasi muda bukannya nilai, melainkan proses, supaya mereka dapat menemukan nilai-nilai mereka sendiri, sesuai dengan tempat dan zamannya.

b. Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral development approach)

Karakteristiknya memberi penekanan kognitif. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi (Elias,

⁸ Winarno dan Wijianto, *Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn)*, (Surakarta : Laboratorium PPKn UNS & UNS Press, 2010). Hlm. 105.

1989). Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama. Pertama, membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral (Superka, et. al., 1976; Banks, 1985).

c. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach)

memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilemma moral yang bersifat perseorangan.

d. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach)

memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Pendekatan ini memberi penekanan pada nilai yang sesungguhnya dimiliki oleh seseorang. Hal yang sangat dipentingkan dalam program pendidikan adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai.

e. Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach)

Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Menurut Elias (1989), Hersh, et. al., (1980) dan Superka, et. al. (1976), pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai oleh Newmann, dengan memberikan perhatian mendalam pada usaha melibatkan siswa sekolah menengah atas dalam melakukan perubahan-perubahan sosial. Menurut Elias (1989), walaupun pendekatan ini berusaha juga untuk meningkatkan keterampilan "moral reasoning" dan dimensi afektif, namun tujuan yang paling penting adalah memberikan pengajaran kepada siswa, supaya mereka berkemampuan untuk

mempengaruhi kebijakan umum sebagai warga dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁹

Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan (Teuku Ramli, 2001).

4. Pendekatan Nilai untuk PKn Perguruan Tinggi

Berpijak pada filsafat pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 maka pembelajaran nilai Pancasila lebih baik menekankan pendekatan penanaman nilai sebagai tujuannya sedangkan proses pembelajarannya bisa menggunakan variasi pendekatan yang lain. Nilai etik sosial, nilai kebangsaan maupun norma hukum yang merupakan cerminan dari Pancasila hendaknya tetap kita pandang sebagai nilai ideal sebagai titik tolak sekaligus hasil dari proses pembelajaran Pancasila. Sedangkan proses penemuan nilai dilakukan melalui variasi pendekatan moral kognitif, analisis nilai, klarifikasi nilai dan pembelajaran berbuat dimana proses-proses tersebut lebih banyak berpusat pada siswa daripada guru.¹⁰ Dengan demikian, dalam pembelajaran pendidik memfasilitasi, tetapi juga pada akhirnya memverifikasi nilai-nilai yang ditemukan mahasiswa apakah telah sesuai atau tidak dengan adanya nilai-nilai dasar yang terkandung Pancasila. Tujuan Pendidikan Nilai adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri mahasiswa. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia lainnya,¹¹

5. PKn sebagai media Pendidikan Karakter/Nilai Moral guna mewujudkan karakteristik kewarganegaraan (Good Citizen) di Perguruan Tinggi.

Pendidikan nilai memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, atau pendidikan budi pekerti. Tujuannya adalah

⁹ Maksudin, 2013, *Pendidikan Karakter Nondikotomik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013). Hlm. 95 - 96.

¹⁰ Winarno, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Panduan Praktis Pembelajaran*. (Yuma Pustaka : Surakarta, 2012). Hlm 65

¹¹ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi dan Penilaian*, (PT Bumi Aksara : Jakarta, 2014). Hlm

membentuk pribadi mahasiswa supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya.

Menurut Budimansyah (2008) Secara singkat karakter kewarganegaraan yang terdiri karakter privat dan publik yaitu

- a. Menjadi masyarakat yang independen
- b. Memenuhi tanggung jawab personal ekonomi dan politik.
- c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
- d. Berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.
- e. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

KESIMPULAN

Eksistensi PKn dalam proses pembelajaran mahasiswa di Perguruan Tinggi sangat erat kaitannya terhadap pembentukan karakter kewarganegaraan yang ditanamkan dalam mahasiswa melalui pendekatan berbasis nilai tidak hanya pengenalan nilai-nilai yang dilakukan, melainkan menginternalisasi pula nilai tersebut kepada mahasiswa guna menuju terwujudnya atribut masyarakat madani yang bercirikan berketuhanan yang maha esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokratis-konstitusional, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, berbhinneka tunggal ika, menjunjung tinggi hak dan kewajiban azasi manusia dan mencintai perdamaian dunia.

Saran untuk dapat memacu terwujudnya karakteristik kewarganegaraan harus di imbangi pula peran dosen dalam melaksanakan KBM PKn terutama lebih memvariasikan sumber bahan ajar yang relevan dan dirasa dapat menambah aspek good citizen dalam diri mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Maksudin. (2013). Pendidikan Karakter Nondikotomik. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Winarno. (2012). Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Panduan Praktis Pembelajaran. Yuma Pustaka: Surakarta.
- Winarno. (2014). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi dan Penilaian. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Winarno, Wijianto. (2010). Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn). Laboratorium PPKn UNS & UNS Press: 2010